

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara demokrasi merupakan negara yang sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi, artinya masyarakat yang menjalankan roda pemerintahan dan masyarakat sangat berperan penting dalam pemilihan umum yang digunakan sebagai pemilihan pemimpin negara. Pemilihan umum sudah diatur dalam Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Undang – Undang No 7 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung diterapkan pula dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah atau Pemilukada adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah serta wakil kepala daerah secara langsung oleh

masyarakat atau penduduk setempat yang telah memenuhi persyaratan yang berdasarkan pada Pancasila serta UUD 1945. Undang – Undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah yaitu Undang – Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Undang – Undang No 10 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015, 2016).

Sebuah partisipasi yang melibatkan penduduk di dalam pemilihan umum daerah merupakan aspek yang paling menonjol dalam pelaksanaan karena masyarakat berhak memilih sesuai dengan dirinya sehingga nantinya berpengaruh kepada kehidupan bernegara dan berbangsa. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui partisipasi rakyat yang seluas – luasnya di dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum daerah, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sebuah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan umum daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan di daerah.

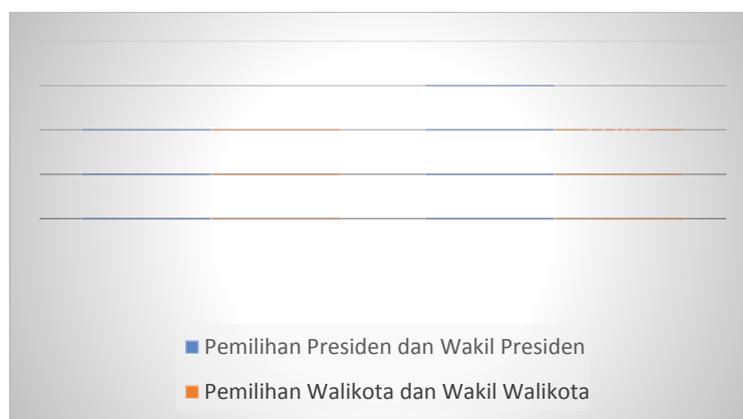
Partisipasi masyarakat dalam dunia politik yaitu memakai hak pilihnya dengan sebaik – baiknya sesuai dengan hati nuraninya dalam pemilihan umum daerah. Kegiatan partisipasi masyarakat harus didorong dengan adanya sebuah kegiatan sosialisasi, yaitu salah satu sebuah metode dengan cara menyampaikan pengetahuan mengenai tahapan serta program

dalam penyelenggaraan, memberikan pendidikan pentingnya pemilu guna meningkatkan pemahaman pemilih dan juga menyebarkan informasi mengenai bagaimana pemilu dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi politik ini sudah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, 2010). Metode yang digunakan dalam sosialisasi politik dapat menggunakan berbagai cara baik itu dengan media massa elektronik maupun media tradisional serta media cetak lainnya. Disamping yang sudah dijelaskan, KPU Kota Bogor telah menyiapkan strategi sosialisasi yang sudah sesuai dengan potensi dan kondisi lokal.

Kegiatan sosialisasi memiliki tujuan guna memperkuat dan mengembangkan sikap pada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya tanggung jawab lembaga pemerintahan, akan tetapi sosialisasi yang terkecil dapat melalui keluarga, sekolah, serta lembaga – lembaga yang ada di masyarakat (Kartono, 1996). Sosialisasi politik menjelaskan bahwa sosialisasi pemilu merupakan penyampaian informasi mengenai tahapan serta program dalam diselenggarakannya pemilihan tersebut. Kebijakan sosialisasi ini pula tidak semata – mata dilaksanakan, fungsinya untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai kehidupan demokrasi sehingga dapat menimbulkan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Selama pesta demokrasi berlangsung khususnya pemilukada dijadikan sarana partisipasi masyarakat dengan mengedepankan demokrasi, akan tetapi kita dihadapkan pada ketidaksiapan masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi sehingga pemahaman politik hanya sebatas memberi suara saja tanpa tahu apa esensi dari demokrasi itu sendiri. Akibatnya pemilu hanya dijadikan sebatas rutinitas yang semakin lama akan ditinggalkan, hal ini menyebabkan angka golput menjadi kandidat kuat dalam pemilukada. Permasalahan golput telah merajalela dimana – mana, karena permasalahan tersebut tidak dapat dibendung pada saat pesta demokrasi digelar baik pada saat pemilu presiden maupun pemilukada (Budiardjo, 2012). Di Provinsi Jawa Barat sendiri selama pelaksanaan pemilu presiden dan pemilukada angka golput selalu menjadi pemenang, terbaru pada Kota Bogor angka golput dalam pemilukada Walikota Bogor 2013-2018 lebih tinggi daripada angka golput pemilu presiden pada tahun 2014-2019 dari jumlah DPT Kota Bogor, hal ini dibuktikan dengan adanya data sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bogor dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Walikota Bogor



Sumber : KPUD Kota Bogor, 2022

Menurut data yang diperoleh dari KPUD Kota Bogor, bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu presiden dan wakil presiden meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2019 sebesar 6,12%. Sedangkan pada pemilukada Walikota dan Wakil Walikota ada peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2018 sebesar 10,75%. KPU RI telah menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan sebesar 75 persen. Target serupa pun dicanangkan oleh KPUD Jawa Barat dan KPUD Kota Bogor. Target tersebut diharapkan dapat memotivasi agar partisipasi pemilih di Kota Bogor dapat meningkat dari pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari hasil pemilihan antara tahun 2008, tahun 2013, dan tahun 2018. Pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota terdapat penurunan partisipasi dari tahun 2008 ke tahun 2013, dan meningkat kembali pada pemilihan tahun 2018 hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Data Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bogor dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor**

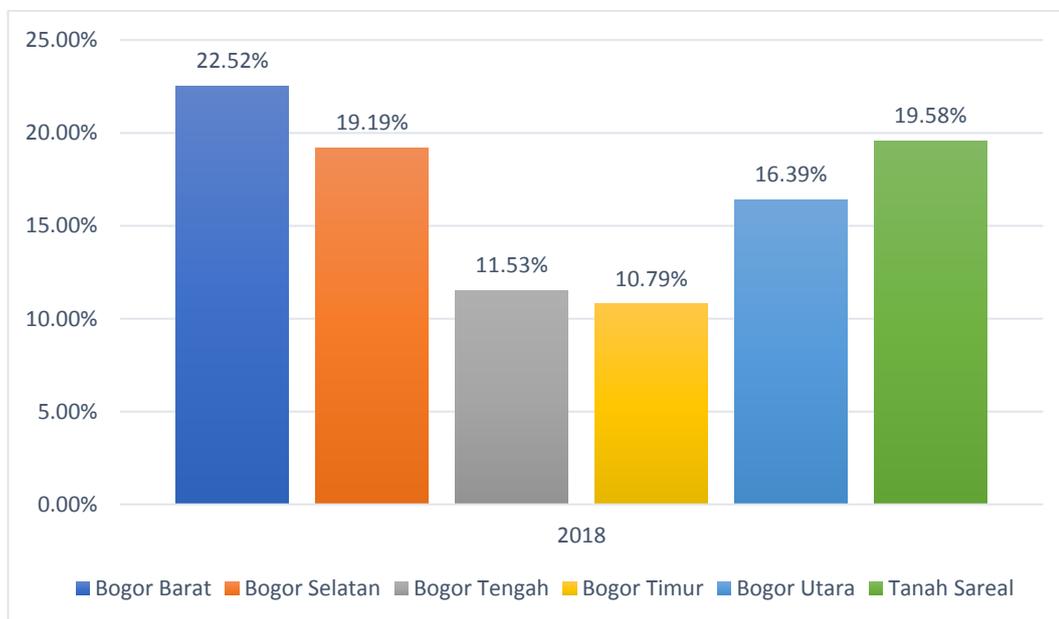
No.	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2013	Tahun 2018
1	Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT)	413.434 jiwa	647.551 jiwa	674.042 jiwa
2	Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	114.367 jiwa	250.757 jiwa	188.560 jiwa

3	Pengguna Hak Pilih	299.067 jiwa	396.794 jiwa	485.482 jiwa
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	72,34%	61,28%	72,03%

Sumber : KPUD Kota Bogor, 2022

Menurut data yang sudah diperoleh dari KPU Kota Bogor, bahwa pada tahun 2008 jumlah DPT sebesar 413.434 jiwa dan sebanyak 114.367 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara sebanyak 299.067 jiwa menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2013 jumlah DPT Kota Bogor sebanyak 647.551 jiwa dan sebanyak 250.757 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara sebanyak 396.794 jiwa menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2018 jumlah DPT Kota Bogor sebanyak 674.042 jiwa dan sebanyak 188.560 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara sebanyak 485.482 jiwa menggunakan hak pilihnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tadinya 72,34% pada tahun 2008 menurun menjadi 61,28% pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 72,03%. Telah terbukti bahwa jumlah partisipasi masyarakat dari tahun 2008 ke tahun 2013 menurun sebesar 11,06% dan meningkat kembali di tahun selanjutnya sebesar 10,75% dan ini menjadi angka hasil peningkatan maupun penurunan di tahun yang berbeda. Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 menurut data diatas terdapat peningkatan dari pemilihan kepala daerah pada tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018**



Sumber : KPUD Kota Bogor, 2022

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 yang tertinggi terdapat pada kecamatan Bogor Barat sebanyak 22,52%, selanjutnya kecamatan Tanah Sareal yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 19,58%, kecamatan Bogor Selatan memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 19,19%, kecamatan Bogor Utara memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 16,39%, kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 11,53%, dan tingkat partisipasi terendah terdapat pada kecamatan Bogor Timur dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 10,79%. Oleh karenanya guna mencari solusi dari permasalahan itu, menjadi sebuah tanggung jawab berbagai kalangan agar tidak terulang kembali pada saat pemilihan umum daerah selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Tidak

adanya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk memilih membuat permasalahan golongan putih ini kerap kali bertambah setiap periodenya, akan tetapi seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak kebebasan memilih. Tidak menggunakan hak memilih tidak menjadi larangan, namun kegiatan tersebut kedepannya akan merugikan masyarakat itu sendiri dikarenakan suara tersebut dapat diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan mempergunakan hak kita sebagai pemilih, digunakan dengan sebaik - baiknya merupakan sebuah bentuk kita sebagai masyarakat ikut berperan di dalam kehidupan bernegara.

Kesadaran politik di Indonesia kurang optimal padahal negara Indonesia menganut sistem demokrasi akan tetapi masih banyak masyarakatnya yang apatis terhadap dunia perpolitikan (Miftah, 2012). Dengan adanya tingkat naik turun ada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kepala daerah, menandakan masih kurang optimalnya sebuah sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi aktif. Penyebab adanya golongan putih ini bukan hanya kurangnya kesadaran dari rakyat itu sendiri, terkadang pihak penyelenggara juga tidak mendorong masyarakatnya untuk memakai hak memilih dengan sebaik – baiknya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi terutama di Kota Bogor yang mempunyai tingkat dalam kesadaran politik masih begitu minim atau dapat dikatakan kurangnya partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemilihan umum daerah, oleh karenanya permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut serta diperhatikan yang selanjutnya nanti akan menghasilkan pemecahan masalah yang sangat efektif agar terciptanya

masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran politik serta memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan nilai demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan apabila partisipasi masyarakat menurun diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal tersebut dilihat dari kurang optimalnya partisipasi masyarakat dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah melihat latar belakang diatas, penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah tersebut, sehingga dapat dirumuskan judul sebagai berikut **“Pengaruh Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Bogor”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan identifikasi masalah yang dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut, antara lain :

1. Kurang optimalnya sosialisasi pemilihan kepala daerah dibandingkan dengan sosialisasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat.
2. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bogor pada tahun 2013 ke tahun 2018 mencapai 10,75%.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi imitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi instruksi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor?
4. Seberapa besar pengaruh dimensi motivasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi imitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor.

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi instruksi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi motivasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Bogor.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori – teori dalam ilmu pengetahuan serta penganalisisannya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti, dapat mengembangkan daya pikir peneliti serta memperluas pengetahuan peneliti dan menjadi masukan guna mengimplementasikan hasil penelitian dan juga ikut berpartisipasi dalam bidang politik.
- b. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber bacaan serta pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan bernegara mengenai partisipasi masyarakat terhadap roda pemerintahan.

- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi pemerintah guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir angka golput di Indonesia, khususnya di Kota Bogor.

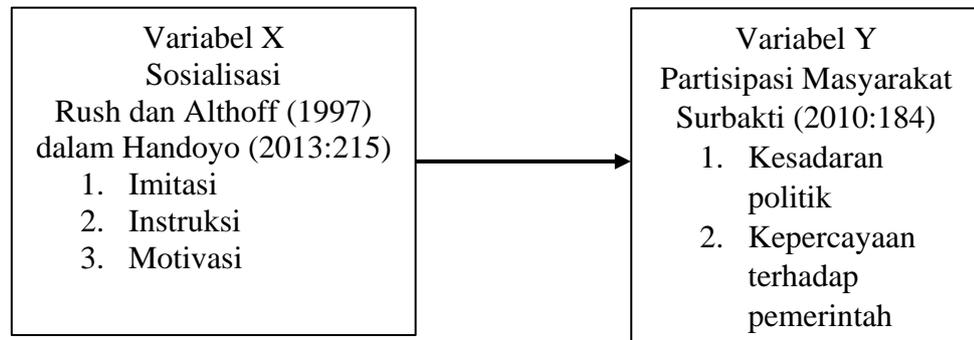
## **1.6 Kerangka pemikiran**

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk aspek penting demokrasi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum baik itu pasif maupun aktif bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peter (2003:39) dalam buku yang berjudul “Sosialisasi dalam kebijakan pemerintah” mengatakan mendapat mengenai sosialisasi, yaitu “Sosialisasi merupakan sebuah langkah yang digambarkan oleh sebuah partisipasi yang dilakukan oleh seorang anak di dalam sebuah masyarakat”. Hal ini sejalan dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Rush and Althoff (1997) dalam (Handoyo, 2013) para agen mentransmisikan elemen – elemen sosialisasi politik sangat beragam. Ada beberapa macam mekanisme yang termasuk kedalam sosialisasi politik, diantaranya sebagai berikut:

1. Imitasi
2. Instruksi
3. Motivasi

Dikarenakan posisi masyarakat yang menjabat paling penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi, membuat posisi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat dalam hal ini menjadi partisipan yang memiliki peran guna terlaksananya pemilihan umum guna menjalankan roda pemerintahan. Faktor yang dapat mempengaruhi taraf partisipasi menurut (Surbakti, 2010) dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut : kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasi dengan pengalaman pada umumnya.

Pengalaman yang diperoleh dari metode tersebut merupakan variabel kunci dari model dimana tingkah laku partisipasi seseorang untuk ditentukan sebagaimana ditentukan oleh banyaknya pengalaman. Nilai dan sikap melalui berbagai macam agen sosialisasi semuanya merupakan bentuk pengalaman. Melihat data yang menyatakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, maka peneliti merasa masalah tersebut menarik untuk diteliti dan teori yang digunakan dapat mewakili identifikasi masalah mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, pengalaman individu yang relevan secara politis muncul dari sosialisasi dan jelas memberikan kontribusi pada proses sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat.

**Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran**

Sumber : data diolah peneliti, 2022

